

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi pendidikan dan keuangan adalah keputusan yang signifikan tentang keberhasilan sistem pendidikan yang merupakan elemen krusial dalam tata kelola pendidikan. Pentingnya aspek keuangan serta pendanaan dalam pendidikan merupakan bagian yang produktif dan strategis yang menjadi penentu suksesnya penyelenggaraan layanan pendidikan. Signifikansi pengelolaan finansial dan pembiayaan pendidikan mencakup berbagai aktivitas untuk pengaturan keuangan institusi pendidikan dari perencanaan, manajemen, akuntansi, biaya, laporan tentang laporan dan tanggung jawab keuangan kepada lembaga pendidikan. (Fermayani et al., 2023)

Dalam perencanaan keuangan, semua pihak manajemen satuan pendidikan yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran sekolah membentuk rapat penyusunan rencana anggaran baik pihak manajemen, komite, termasuk memasukkan tenaga pengajar (guru), akan menguntungkan semua pihak karena akan lebih sesuai dengan apa yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan di setiap bidang di sekolah. Partisipasi seluruh elemen sekolah memberikan dorongan melalui saran, pendapat, pengawasan pelaksanaan, komitmen, dan pengendalian anggaran, yang dapat menghasilkan kemudahan akses terhadap data atau

informasi serta tanggung jawab dalam keuangan, dan juga peningkatan kepuasan karyawan serta efisiensi dalam meraih target yang telah ditentukan sebelumnya. (Halimah et al, 2023)

Sekolah memiliki fungsi utama sebagai lembaga pendidikan untuk mengembangkan generasi bangsa, seharusnya menjadi fokus utama bagi semua komponen di dalamnya terutama bagi para guru karena institusi ini dan komponennya memikul tanggung jawab yang cukup besar dalam pelaksanaannya termasuk transparansi dan akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, pemanfaatan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di lingkungan sekolah memiliki peranan yang signifikan, yang harus diputuskan oleh Tim BOS Sekolah, Pengajar, dan Komite Sekolah melalui kolaborasi. Pemanfaatan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) harus mengikuti urutan kebutuhan yang menjadi fokus utama sekolah, dengan maksud sebagai upaya percepatan realisasi Standar Pelayanan serta Raport Mutu sekolah sebagai acuannya. Sekolah wajib menyelenggarakan pembukuan secara utuh dalam rangka pengelolaan BOSP Sesuai dengan ketentuan pengelolaan pendidikan serta norma hukum yang mengatur tata cara dan kewajiban lembaga pengelola keuangan. Mengingat kebutuhan tersebut, diperlukan adanya sistem informasi yang didukung komputer sebagai alternatif untuk regulasi dan tantangan tata kelola keuangan sekolah juga berperan sebagai alat pemecahan masalah. Teknologi informasi dapat membantu mengurangi

waktu kerja sekaligus menghasilkan hasil yang benar atau valid. (Abernathy, 2024)

Manajemen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) merupakan faktor penting yang mendukung terciptanya efektivitas dan efisiensi yang lebih baik dalam pelaksanaan pendidikan pada tingkatan dasar dan menengah. Di Indonesia, dana operasional untuk penyelenggaraan satuan pendidikan berperan sebagai alat strategis dalam mendukung pelaksanaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang digunakan pemerintah dalam upaya distribusi yang merata terhadap kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan kualitas layanan pendidikan, serta kemandirian pengelolaan keuangan sekolah. Oleh karena itu, kualitas laporan penggunaan dana operasional untuk penyelenggaraan satuan pendidikan merupakan salah satu indikator krusial yang mencerminkan tingkat akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan dana publik di bidang pendidikan.

Namun dalam praktiknya mutu pelaporan dana operasional yang dialokasikan melalui program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di sejumlah lembaga pendidikan sering terjadi masalah dalam administrasi dan pengelolaannya. Menurut data SPI Pendidikan 2024 mengungkapkan bahwa sekitar 12% penggunaan dana BOS menyimpang dari ketentuan yang ada, ada indikasi nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa pada 40%, serta 47% diduga terlibat dalam praktik penggelembungan biaya. Lebih lanjut, masalah seperti laporan yang tidak

tepat dan perubahan dokumen masih terjadi di 42% institusi pendidikan. Kita harus mengakui bahwa tantangan paling signifikan yang dihadapi dana BOS adalah penyaluran dan pengelolaan dana di tingkat sekolah masih menghadapi kelemahan, terutama terkait kurangnya transparansi. Ini seringkali menyebabkan keterlambatan transfer dana yang dipicu oleh beragam faktor, seperti penundaan penyaluran dana oleh pemerintah pusat dan waktu yang diperlukan oleh tim manajemen BOS daerah dalam proses penerbitan surat pengantar pencairan dana (Lestari et al., 2023)

Menurut Wursanto (2022) tipe paternalistik merupakan gaya kepemimpinan yang memiliki karakteristik kebapakan. Pemimpin dengan sifat kebapakan merupakan karakteristik pemimpin yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan pendekatan seperti seorang ayah terhadap anak-anaknya, yang dapat menjadi salah satu faktor yang berpengaruh mengenai mutu penyajian laporan keuangan yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Gaya kepemimpinan ini menekankan peran pemimpin sebagai figur otoritatif yang juga menunjukkan perhatian dan perlindungan terhadap bawahannya. Dalam konteks sekolah, pemimpin yang paternalistik dapat memengaruhi kinerja staf dan guru dalam mengelola serta melaporkan dana secara tertib dan bertanggung jawab.

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia (*Human Capacity Development/HCD*) merupakan tahap di mana seseorang memperoleh keahlian tertentu untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi yang

memiliki peran signifikan. Ketersediaan pelatihan, pembinaan, serta peningkatan kompetensi tenaga administrasi dan pengelola keuangan sekolah dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap regulasi dan teknis pelaporan Dana BOSP. Semakin baik kapasitas personel atau karyawan yang menjalankan semakin optimal fungsi organisasi dijalankan. Dengan demikian, akan terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan seiring dengan perbaikan.

Terdapat variabel lain yang turut berkontribusi dalam memberikan pengaruh yang juga sangat krusial adalah sistem kompensasi. Kompensasi adalah imbalan merujuk pada beraneka ragam hal seperti uang, hadiah, serta penghargaan yang disiapkan dan diberikan oleh sebuah organisasi kepada pegawainya sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan upaya yang telah mereka lakukan. Pemberian imbalan yang layak dan proporsional kepada staf yang terlibat dalam pengelolaan Dana BOSP dapat meningkatkan motivasi kerja dan rasa tanggung jawab mereka dalam menjalankan tugas. Dengan kompensasi yang memadai, diharapkan individu akan lebih berkomitmen untuk menyusun laporan yang mengandung ketepatan informasi, disampaikan secara tepat waktu, serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Penelitian Asbar (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompensasi terbukti memiliki dampak substansial terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sigi. Akan tetapi penelitian Setiyani (2022) hasilnya

kompensasi ketika dilihat secara terpisah (individu), variabel ini tidak menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap kinerja guru honorer di SMPN 2 Arjasari Kabupaten Bandung

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan suatu jenis bentuk transfer fiskal dari Pemerintah Pusat ke sekolah-sekolah guna mendukung kegiatan operasional pendidikan. Namun, dalam praktiknya, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSP sering kali menjadi sorotan karena beragam tantangan teknis dan non-teknis.

Di Kabupaten Jombang, berdasarkan observasi awal dan temuan dari beberapa sumber (laporan pengawasan dari Inspektorat, BPK, atau Dinas Pendidikan), ditemukan beberapa fenomena yang menunjukkan adanya masalah dalam kualitas laporan BOSP di tingkat SMP, antara lain:

1. Beberapa kepala sekolah di SMP se-Kabupaten Jombang menerapkan gaya kepemimpinan yang sentralistik dan dominan tanpa melibatkan banyak pihak dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOSP. Namun, ada pula kepala sekolah yang menggunakan pendekatan *paternalistik*, yaitu otoriter namun peduli terhadap bawahan, yang ternyata berdampak positif terhadap kedisiplinan dan kinerja tim BOS

2. Tingkat kemampuan teknis staf sekolah dalam menyusun laporan keuangan BOSP sangat bervariasi. Beberapa sekolah memiliki staf yang kompeten, sementara lainnya masih mengalami kendala dalam memahami sistem aplikasi BOS (ARKAS), prosedur akuntansi, atau regulasi terbaru.
3. Pengelola BOSP di sekolah seperti bendahara atau operator, sering mengeluhkan beban kerja tinggi tanpa imbalan yang setara baik dalam bentuk honor maupun insentif. Hal ini dapat menurunkan motivasi kerja dan mengakibatkan kinerja pelaporan menjadi asal-asalan atau tertunda.
4. Beberapa sekolah di Jombang masih ditemukan terlambat menyeter laporan BOSP, terdapat kesalahan input data, dan kurangnya bukti pendukung transaksi. Hal ini menyebabkan evaluasi dana BOSP dari Dinas Pendidikan menjadi terkendala dan menimbulkan pertanyaan soal transparansi

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis melaksanakan penelitian tentang pengaruh *paternalistik leadership*, *human capacity development*, dan kompensasi terhadap kualitas laporan Dana BOS. Penelitian ini secara khusus akan difokuskan pada satuan pendidikan tingkat SMP di Kabupaten Jombang, mengingat peran krusial Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam menjamin mutu Pendidikan Dasar Menengah serta pengelolaan dana BOSP yang kompleks.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis melaksanakan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Paternalistik Leadership*, *Human Capacity Development (HCD)*, dan Kompensasi terhadap Kualitas Laporan Dana BOSP (Studi Kasus pada SMP se-Kabupaten Jombang)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, penelitian ini akan mengkaji permasalahan berikut:

1. Apakah *Paternalistik Leadership* mempengaruhi kualitas penyusunan laporan dana BOSP pada SMP se-Kabupaten Jombang ?
2. Apakah *Human Capacity Development (HCD)* mempengaruhi kualitas penyusunan laporan dana BOSP pada SMP se-Kabupaten Jombang ?
3. Apakah Kompensasi mempengaruhi kualitas penyusunan laporan dana BOS ?
4. Variabel mana di antara *Paternalistik Leadership*, *Human Capacity Development (HCD)*, dan kompensasi yang memberikan dampak paling signifikan terhadap Kualitas Laporan Dana BOSP di semua SMP di Kabupaten Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan:

1. Untuk mengidentifikasi serta menjelaskan pengaruh *Paternalistik Leadership* terhadap Kualitas Laporan Dana BOSP pada SMP se-Kabupaten Jombang

2. Untuk mengidentifikasi serta menjelaskan pengaruh *Human Capacity Development (HCD)* terhadap kualitas laporan dana BOSP pada SMP se-Kabupaten Jombang
3. Untuk mengidentifikasi serta menjelaskan pengaruh Kompensasi kualitas laporan dana BOSP pada SMP se-Kabupaten Jombang
4. Untuk mengetahui variabel yang berkontribusi paling besar. dari *Paternalistik Leadership, Human Capacity Development (HCD)*, dan Kompensasi terhadap Kualitas Laporan Dana BOSP pada SMP se-Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

Riset ini memiliki beberapa kontribusi yang dapat dijelaskan yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya riset ini, memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam kontribusi memperkaya wawasan para mahasiswa Universitas Darul 'Ulum Jombang, dan menambah kajian tentang Kualitas Laporan Dana BOSP pada SMP se-Kabupaten Jombang.

2. Manfaat Praktis

Studi ini diharapkan dapat menyumbangkan gagasan/manfaat berupa rekomendasi atau pertimbangan ilmiah mengenai *Paternalistik Leadership, Human Capacity Development (HCD)*, dan Kompensasi Terhadap Kualitas Laporan Dana BOSP pada SMP se-Kabupaten Jombang.